



<https://diskominfo.pesisirselatankab.go.id>



@PPID Kabupaten Pesisir Selatan



@diskominfoessel



@Kominfo Pessel



@Kominfo Pesisir Selatan

LKjIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

2024



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PESISIR SELATAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT berkat rahmat dan karunia-Nya Laporan Kinerja (LKj) Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Pesisir Selatan Tahun 2024 telah dapat diselesaikan. Penyusunan Laporan Kinerja ini merupakan salah satu bentuk penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang lebih baik dan dalam rangka bahan evaluasi kinerja kedepan.

Laporan Kinerja Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan menyajikan hasil pelaksanaan program/kegiatan Dinas Tahun 2024, merupakan tahun keempat pelaksanaan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Periode 2021-2026.

Secara umum capaian kinerja program/kegiatan 2024 tercapai, namun ada beberapa sasaran yang telah ditetapkan pada indikator kinerja kunci seperti kegiatan survey statistik sektoral dan penyusunan buku profil daerah belum terlaksana karena keterbatasan anggaran serta masih berada pada Perangkat Daerah lain (Bapedalitbang). Kedepan hal ini haruslah menjadi pertimbangan daerah agar dapat dilaksanakan, karena data survey akan menghasilkan data yang valid dan menjadi pedoman dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah .

Akhirnya kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas dukungan/kerjasama seluruh aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan atas konstribusinya dalam Penyusunan Laporan Kinerja ini Kami menyadari laporan ini masih jauh dari sempurna. Semoga Laporan ini bermanfaat dalam upaya peningkatan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Painan, 15 Januari 2025

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Pesisir Selatan


WENDI, SH., M. Hum
NIP. 19760407.199803 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan

BAB II HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

- 2.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Capaian pelaksanaan program dan kegiatan
- 2.2 Kebijakan Strategis yang Ditetapkan
- 2.3 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

- 3.1 Urusan Pemerintahan yang Ditugas Pembantuankan
- 3.2 Hambatan/Permasalahan Dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaian

BAB IV PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Terselenggaranya pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (*Good Governance and clean Government*) merupakan prasyarat bagi setiap instansi Pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara, sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimasi agar penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan Nepotisme.

Dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan Nepotisme disebutkan bahwa asas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

Sejalan dengan itu, sebagai tindak lanjut dari undang undang tersebut telah diterbitkan Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang kemudian diperbarui dalam Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Disamping itu terjadi pula penyesuaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menjadi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas laporan Keuangan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sistem pemerintahan yang baik bersih dan berwibawa (*Good Governance dan Clean Government*) di Indonesia.

Dengan demikian, Laporan Kinerja yang disusun secara periodik setiap akhir tahun anggaran tersebut menjadi media pertanggung jawaban dan sebagai perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan

keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah di amanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara teratur dengan sasaran atau target kinerja.

1.2 Dasar Hukum

Landasan hukum penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Kinerja Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pelaporan LAKIP dan Penetapan Kinerja;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Review atas Laporan Kinerja;
5. Keputusan Kepala LAN Nomor : 589/IX/6/4/1999 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Nomor 2 tahun 2021 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Dinas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan nomor 27 tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Tugas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud disusunnya Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban adalah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah:

1. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumberdaya.
2. Sebagai alat untuk mengetahui dan memperbaiki/menyempurnakan kelemahan/kekurangan dalam pencapaian sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya;

3. Sebagai sarana pemantau dan peringatan dini terjadinya penyimpangan dalam menjalankan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan.

Gambaran Umum

1. Tugas pokok dan Fungsi

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah. Untuk melaksanakan tugas, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan diatur dengan Peraturan Bupati Nomor 132 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Komunikasi dan Informatika. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan Kebijakan teknis bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian.
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian.
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian.
- d. Pelaksanaan administrasi dinas bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Struktur Organisasi

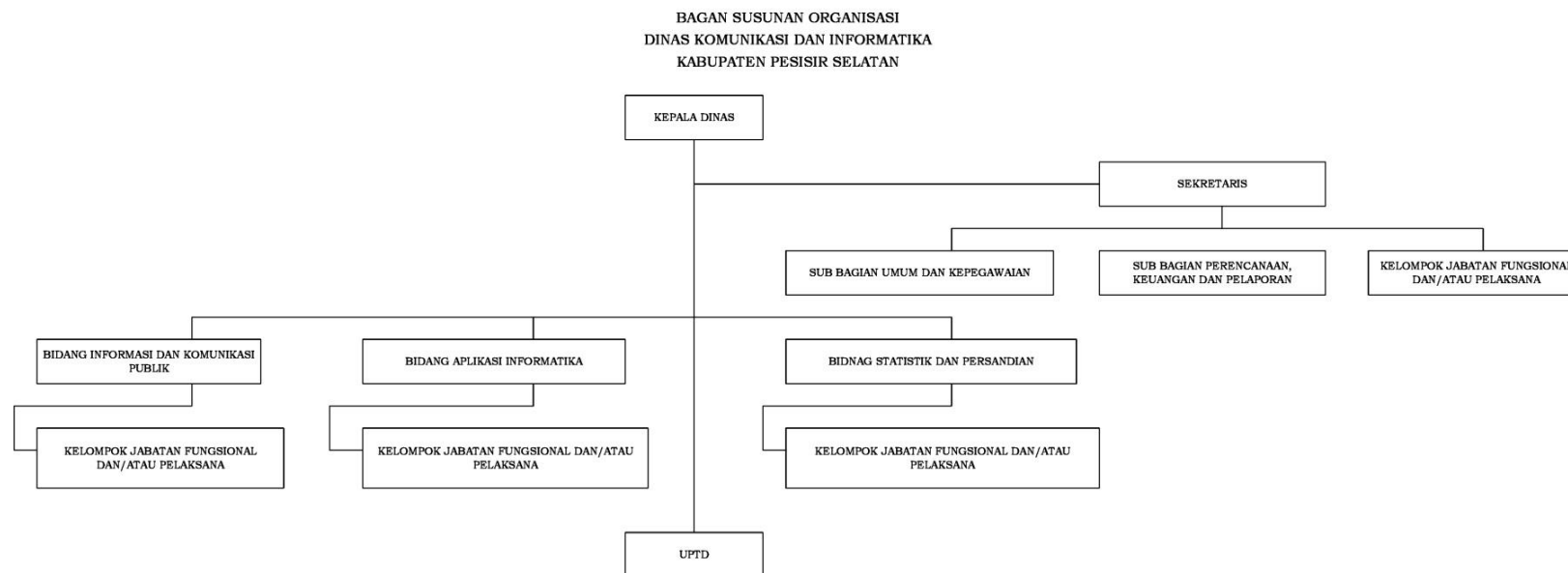
Sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Dalam Kabupaten Pesisir Selatan Struktur Organisasi OPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari :

1. Kepala Dinas (Eselon II.b)
2. Sekretaris (Eselon III.a) dibantu 2 (dua) Sub Bagian(Eselon IV.a) yaitu :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
 - c. Bidang Aplikasi Informatika, idang Informasi dan Komunikasi Publik dan Bidang Statistik dan Persandian (Eselon III.b) dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau pelaksana

3. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas kewajiban dan peran sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan .

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMINFO KABUPATEN PESISIR SELATAN

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan

BAB II

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

2.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024

1. URUSAN : KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

PERANGKAT DAERAH : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Pembentukan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 tahun 2021 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Melalui Peraturan Daerah dimaksud, diharapkan terjadi penguatan kelembagaan dalam bidang informatika sejalan dengan tujuan pemerintah saat ini yang mengedepankan penggunaan teknologi (elektronik) dalam menunjang kinerja pelayanan birokrasi, disamping tugas pokoknya sebagai lembaga yang menangani komunikasi.

Adapun pagu dana untuk Urusan Komunikasi Dan Informatika pada tahun 2024 untuk mengakomodir Urusan Komunikasi Dan Informatika dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 8.058.052.045 dengan realisasi Rp. 7.468.623.001 Realisasi Rill dengan tingkat realisasi mencapai angka 93 % dengan rincian sebagai berikut :

No	Urusan Pemerintah an	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/S ub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerj a	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14
1	Komunikas i dan Informatik a	Dinas Komunikasi dan Informatika		PROGRA M PENUNJA NG URUSAN PEMERIN TAHAN DAERAH KABUPA TEN/KOT A	Jumlah Terlaksananya penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Persen	100	100	4.927.716.282	4.554.285.437	-
1				Kegiatan Perencana an, Pengangga ran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat daerah	Bulan	12	12	50.143.425	49.696.278	
1				Sub Kegiatan Penyusuna	Jumlah Dokumen Perencanaan	Dokumen	12	12	50.143.425	49.696.278	

No	Urusan Pemerintah an	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/S ub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerj a	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Ket.
				n Dokumen Perencanaa n Perangkat Daerah	Perangkat Daerah						
2				Kegiatan Administr asi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	Bulan	12	12	4.151.398.729	3.833.274.362	
1				Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bu lan	34	34	4.074.247.413	3.756.668.450	
2				Sub Kegiatan Penyediaan Adminstras i Pelaksanaa n Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Bulan	12	12	77.151.316	76.605.912	

No	Urusan Pemerintah an	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/S ub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerj a	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Ket.
3				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	Bulan	12	12	205.493.505	197.187.487	
1				Sub Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	7	7	8.055.600	8.051.000	
2				Sub kegiatan penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5	5	9.431.437	9.332.500	
3				Sub kegiatan penyediaan barang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	Paket	4	4	15.598.168	10.609.000	

No	Urusan Pemerintah an	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/S ub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerj a	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Ket.
				cetakan dan penggandaan	yang Disediakan						
4				Penyediaan bahan bacaan dan perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	12	5.400.000	5.040.000	
5				Sub kegiatan fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	60	60	6.160.000	4.782.000	
6				Sub kegiatan penyeleng- araan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	200	200	160.848.300	159.372.987	

No	Urusan Pemerintah an	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/S ub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerj a	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Ket.
4				Kegiatan penyediaa n jasa penunjang urusan pemerinta han Daerah	Terpenuhinya Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah Kab. Pesisir Selatan	Bulan	12	12	291.688.279	247.965.210	
1				Sub Kegiatan Penyediaan jasa Komunikas i, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Bulan	12	12	210.360.000	166.758.412	
2				Sub Kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Bulan	12	12	81.328.279	81.206.798	

No	Urusan Pemerintah an	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/S ub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerj a	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Ket.
5				Kegiatan pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Bulan	12	12	228.992.344	226.162.100	
1				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1	62.020.000	61.037.100	

No	Urusan Pemerintah an	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/S ub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerj a	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Ket.
2				Sub Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	2	2	83.190.535	81.773.450	
3				Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	81	81	25.107.809	24.825.000	
4				Sub Kegiatan pemeliharaan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan	Unit	1	1	58.674.000	58.526.550	

No	Urusan Pemerintah an	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/S ub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerj a	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Ket.
				an/Rehabili tasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi						
2				PROGRA M INFORM ASI DAN KOMUNI KASI PUBLIK	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kot	Persen	100	100	991.743.136	836.287.101	

No	Urusan Pemerintah an	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/S ub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerj a	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Ket.
					a						
1				Kegiatan Pengelolaan informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	Terlaksananya Pengelolaan Informasi dan komunikasi publik Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Bulan	12	12	991.743.136	836.287.101	
1				Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi	Dokumen	12	12	197.395.070	181.640.873	

No	Urusan Pemerintah an	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/S ub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerj a	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Ket.
					Publik						
2				Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Dokumen	3500	4500	210.486.716	162.677.340	
3				Sub Kegiatan Penyelengg araan Hubungan Masyarakat , Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasi kan Informasi Program atau Kebijakan	Dokumen	15	15	583.861.350	491.968.888	
3				PROGRA M APLIKAS	Persentase layanan publik yang	Persen	100	100	2.138.592.627	2.076.757.463	

No	Urusan Pemerintah an	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/S ub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerj a	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Ket.
				I INFORM ATIKA	diselenggarakan secara online dan terintegrasi						
1				Kegiatan Pengelolaan e- government di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	Terwujudnya penyelenggaraan e Government atau sistem pemerintah berbasis elektronik di pemerintah Kab. Pesisir Selatan	Persen	100	100	2.138.592.627	2.076.757.463	
1				Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan e- Government dalam penyelenggaraan	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E - Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Dokumen	5	5	32.814.149	32.814.149	

No	Urusan Pemerintah an	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/S ub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerj a	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Ket.
				araan Pemerintah an Daerah Kabupaten/ Kota	Kabupaten/Kota						
2				Sub Kegiatan Pengemban gan dan pengelolaa n ekosistem Kabupaten/ Kota cerdas	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Dokumen	12	12	1.885.582.221	1.828.333.464	
3				Sub Kegiatan Pengemban gan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintah	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	Aplikasi	5	5	219.814.550	215.609.850	

No	Urusan Pemerintah an	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerj a	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Ket.
				an Berbasis Elektronik							

2. URUSAN : PERSANDIAN

PERANGKAT DAERAH : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Adapun jumlah pagu dana untuk Urusan Persandian pada tahun 2024 untuk mengakomodir Persandian dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 57.579.802 dengan realisasi Rp.56.745.250 dengan tingkat realisasi mencapai angka 99 % dengan rincian sebagai berikut :

No	Urusan Pemerintah an	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijaka n	Uraian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14
1	Persandian	Dinas Komunikasi dan Informatika		PROGRAM PENYELENG GARAN PERSANDIA N UNTUK PENGAMAN	Persentase tingkat keamanan informasi pemerintah	Persen	100	100	57.579.802	56.745.250	

No	Urusan Pemerintah an	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijaka n	Uraian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Ket.
				AN INFORMASI							
1				Kegiatan Penyelenggar aan Persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah Kabupaten/K ota	Terlaksana nya peningkata n keamanan informasi pemerintah daerah	Persen	12	12	57.579.802	56.745.250	
1				Sub Kegiatan pelaksanaan keamanan informasi Pemerintah daerah Kabupaten/Kot a berbasis elektronik dan non elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintaha n Daerah Kabupaten/ Kota Berbasis Elektronik dan Non	Lapora n	3	3	57.579.802	56.745.250	

No	Urusan Pemerintah an	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijaka n	Uraian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Ket.
					Elektronik						

3. URUSAN : STATISTIK

PERANGKAT DAERAH : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Adapun jumlah pagu dana untuk Urusan Statistik pada tahun 2024 untuk mengakomodir Statistik dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 114.709.640 dengan realisasi Rp. 78.344.800 dengan tingkat realisasi mencapai angka 68 % dengan rincian sebagai berikut :

No	Urusan Pemerinta han	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14
1	Statistik			PROGRAM PENYELE NGGARAN STATISTI K SEKTORA L	Persentase perangkat daerah yang menghasilk an data statistik yang valid dan handal	Persen	100	100	114.709.640	78.344.800	
1				Kegiatan Penyelengga	Terpenuhi nya	Persen	100	100	144.166.996	78.344.800	

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Ket.
				raan statistik sektoral di Lingkup daerah Kabupaten/ Kota	penyediaan data statistik sektoral daerah Kab. Pesisir Selatan						
1				Sub Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Dokumen	120	120	61.371.244	38.244.100	
				Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang	140	180	82.795.752	40.100.700	

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Ket.
				SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang terintegrasi	a dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi						

**ANALISA KESESUAIAN KINERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2024**

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai AKIP Perangkat Daerah	A (84,5)	A (85,49)	101,17%
2	Meningkatnya Kapabilitas Birokrasi	Pengelolaan Aplikasi Informatika	Indeks SPBE	4,20	4,23	100,71%
		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral				
		Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi				
3	Meningkatnya Digitalisasi Pemerintahan	Pengelolaan Aplikasi Informatika	Indeks Layanan Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	4,76	4,38	92,01%
		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral				

		Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi				
4	Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Kategori Keterbukaan Informasi Publik	Informatif (99,95)	Menuju Informatif (86,68)	86,72%
5	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Kematangan Inovasi PD	100	95	95,00%

- **Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja**

a. Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja yaitu:

Secara operasional pencapaian sasaran ini diwujudkan melalui pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, serta Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Keberhasilan pencapaian sasaran Program ini diperoleh dari indikator kinerja Program “ Nilai AKIP Perangkat Daerah”. Terealisasi A (84,5) dari target kinerja sebesar A (85,49), sehingga tingkat pencapaian indikator kinerja dengan pencapaian rata-rata 101,17 % atau berkriteria SANGAT BAIK.

b. Meningkatkan Kapabilitas Birokrasi

Secara operasional pencapaian sasaran ini diwujudkan melalui pelaksanaan Program Pengelolaan Aplikasi Informatika, Program Penyelenggaraan Statistik Sektor, Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi dengan Kegiatan

Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota. Keberhasilan pencapaian sasaran Program ini diperoleh dari indikator kinerja Program “ Indeks Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)”. Terealisasi 4,23 dari target kinerja sebesar 4,20, sehingga tingkat pencapaian indikator kinerja dengan pencapaian rata-rata 100,17 % atau berkriteria SANGAT BAIK.

c. Meningkatnya Digitalisasi Pemerintahan

Secara operasional pencapaian sasaran ini diwujudkan melalui pelaksanaan Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota. Keberhasilan pencapaian sasaran Program ini diperoleh dari indikator kinerja Program “ Indeks Layanan Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)”. Terealisasi 4,38 dari target kinerja sebesar 4,76, sehingga tingkat pencapaian indikator kinerja dengan pencapaian rata-rata 92,01% atau berkriteria BAIK.

d. Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik

Secara operasional pencapaian sasaran ini diwujudkan melalui pelaksanaan Program Pengelolaan Aplikasi Informatika, Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral, Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi dengan Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Kegiatan Pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Keberhasilan “Kategori Keterbukaan Informasi Publik”. Terealisasi 86,88 dari target kinerja sebesar 99,95, sehingga tingkat pencapaian indikator kinerja dengan pencapaian rata-rata 86,72% atau berkriteria BAIK.

e. Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah

Secara operasional pencapaian sasaran ini diwujudkan melalui pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi

Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, serta Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Keberhasilan pencapaian sasaran "Nilai Kematangan Inovasi PD".. Terealisasi 95 dari target kinerja sebesar 100, sehingga tingkat pencapaian indikator kinerja dengan pencapaian rata-rata 100 % atau ber kriteria BAIK.

Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan :

- a. Belum optimalnya SDM pengelola komunikasi dan informatika lingkup Pemerintah Kabupaten;
- b. Masih adanya blankspot area di beberapa wilayah Kabupaten Pesisir Selatan,
- c. Masih banyak kesenjangan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi informasi;
- d. Masih kurangnya informasi mengenai penilaian SMKI.
- e. Masih belum optimal Pembinaan KIM di Kab. Pessel

2. Solusi

1. Bimbingan teknis bagi pengelola komunikasi dan informatika baik di OPD dan di lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika;
2. Mengajukan permohonan fasilitasi jaringan telekomunikasi untuk blankspot area di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan kepada Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Kominfo;
3. Bimbingan teknis untuk Penilaian SMKI
4. Adanya Penambahan anggaran untuk pendataan dan pembinaan KIM

Pencapaian Kinerja untuk 5 Program di Dinas Komunikasi dan Informatika :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika, pelaksanaan operasional/rutin Dinas Komunikasi dan Informatika, pencapaian kinerjanya sudah sesuai dengan yang ditetapkan dalam target pada masing-masing sub kegiatan.
2. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika pada Bidang Aplikasi Informatika, capaian kinerja yang dicapai yaitu :

- Terjaganya stabilitas akses internet dan intranet di 41 Perangkat Daerah, 1 RSUD, 21 Puskesmas, dan 182 Nagari.
- Terselenggaranya penyampaian informasi dalam bentuk video melalui videotron sampai saat ini.
- Terlaksananya pengawasan dan pemantauan CCTV pada titik-titik lokasi publik seperti daerah wisata dan perangkat daerah.
- Terkoneksinya jaringan internet melalui jaringan internet Fiber optik sebanyak 35 titik dengan ruang lingkup perkantoran di Kecamatan IV Jurai.
- Terkoneksinya jaringan internet melalui radio pemancar internet (Mini Tower) ke nagari-nagari di Kabupaten Pesisir Selatan.
- Pengawasan dan Pengendalian Jaringan TIK Kabupaten



- Pengawasan dan pengendalian lokasi CCTV Publik sebanyak 3 spot (Batas Kota, Carocok Painan, Taman Spora);

• **Batas Kota**



- **Carocok Painan**



- **Taman Spora**



- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin: (Jaringan Fiber Optik, Mini Tower, Peralatan TIK/Server,Videotron).

- **Jaringan Fiber Optik**



- **Mini Tower**



- **Videotron**



Pada Tahun 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan telah melakukan pengembangan dan pembuatan 13 aplikasi dari 10 aplikasi yang direncanakan, yaitu :

- Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Nagari
- Pengembangan e_Sakip
- Pengembangan Aplikasi Pronasa (Program Nagari Bersekolah)
- Pengembangan Aplikasi PPDB Online (Penerimaan Peserta Didik Baru)
- Pengembangan Aplikasi sistem Informasi Kerjasama Media Massa
- Pengembangan Aplikasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (e_TLHP)
- Pengembangan Aplikasi Percepatan Aksi Recovery Stunting
- Pengembangan Aplikasi Manajemen Puskesmas
- Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pertanian
- Pengembangan Aplikasi Informasi Pariwisata
- Pengembangan Aplikasi Laporan Pengawasan Inflasi Daerah
- Aplikasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- Aplikasi Booking Semangki
- Aplikasi Absensi Online
- Pengembangan Aplikasi Opendata

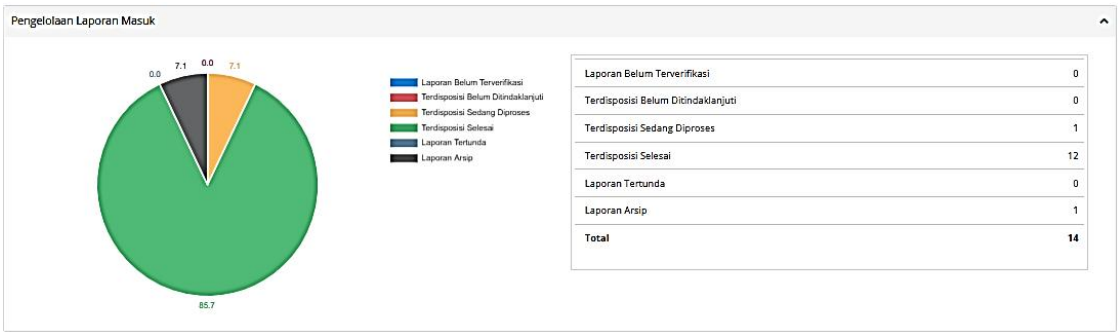
- p. Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Masyarakat Penerimaan Manfaat
- q. Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pajak Daerah
- r. Pengembangan Aplikasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan pengaduan Tahun 2024, Kabupaten Pesisir Selatan melakukan percepatan tindaklanjut penyelesaian pengaduan dengan langkah - langkah sebaai berikut:

- a) Membentuk Tim Pengelola Pengaduan
- b) Melakukan Monitoring dan Evaluasi ke Unit Pengaduan
- c) Koordinasi dan Konsultasi evaluasi hasil tindak lanjut ke Propinsi
- d) Peningkatan kapasitas aparatur pengelola SP4N-LAPOR!.

Tabel capaian kinerja hasil tindak lanjut pengelolaan pengaduan kabupaten pesisir selatan tahun 2024.

Unit Kerja	Belum Terverifikasi	Belum Ditindaklanjuti	Proses	Selesai	Total	%TL	RTL	RHP	Terakhir Dilihat
Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan	0	0	1	12	13	100	0	5.00	2024-11-19 12:03:22
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan	0	0	0	2	2	100	0	0	2024-06-14 10:59:16
Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan	0	0	1	1	2	100	0	0	2024-10-31 11:23:33
Kecamatan Linggo Sari Kabupaten Pesisir Selatan	0	0	0	2	2	100	0	0	2024-08-01 14:28:27
Dinas Kesehatan Kabupaten Pesir Selatan	0	0	0	1	1	100	0	0	2024-07-04 18:05:22
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan	0	0	0	1	1	100	0	0	2024-10-16 15:40:38
Dinas Pertanian	0	0	0	1	1	100	0	0	2024-03-28 02:54:02
Kecamatan IV Nagari Bayang Utara	0	0	0	1	1	100	0	0	2024-09-17 15:35:20
Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan	0	0	0	1	1	100	0	0	2024-09-17 08:35:53
Puskesmas Lumpo	0	0	0	1	1	100	0	0	2024-10-02 09:20:19
Puskesmas Ranah Ampek Hulu Tapan	0	0	0	1	1	100	0	5.00	2024-03-21 05:06:23



Dari diagram di atas dapat terlihat status pengaduan :



85,7% pengaduan terdistribusi selesai



7,3% Terdistribusi sedang diproses



7,0% Laporan Arsip (berisi laporan pengaduan yang tidak jelas isi dan tujuannya serta pengaduan yang berulang

3. Program Informasi dan Komunikasi Publik pada Bidang Informasi Komunikasi Publik, capaian kinerja yang dicapai yaitu :
 1. Melaksanakan Rapat Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana (OPD dan Kecamatan) dan PPID Nagari serta Bimbingan Teknis Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya pengelola informasi dan dokumentasi publik untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik di Kabupaten Pesisir Selatan dengan tema **“Optimalisasi Peran dan Fungsi PPID dalam Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik”** Tanggal 3 Desember 2024.



Rakor PPID Pelaksana (OPD dan Kecamatan) dan PPID Nagari serta Bimtek Monev KIP Tingkat Kab. Pesisir Selatan Tahun 2024 di Saga Murni Hotel.

2. Pembinaan dan Monitoring langsung ke PPID Pelaksana dan PPID Nagari guna optimalisasi pengumuman dan penyediaan informasi publik dan memberikan pelayanan informasi publik yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Pembinaan PPID Nagari Air Haji Barat



Pembinaan PPID Nagari se-Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan

3. Pengumpulan dan Penyusunan dokumen daftar informasi publik (DIP) melalui website masing-masing PPID Pelaksana yang terintegrasi dengan PPID Utama melalui halaman website: <https://ppid.pesisirselatankab.go.id/> yang diklasifikasikan dan diverifikasi oleh Tim Verifikator PPID Utama Kabupaten Pesisir Selatan. Total daftar informasi publik Tahun 2024 untuk masing-masing kategori:

OPD	: 2.425 DIP
Kecamatan	: 626 DIP
Nagari	: <u>754 DIP</u>
Total	3.805 DIP

4. Monitoring dan Evaluasi (Monev) publikasi Dokumen Daftar Informasi Publik (DIP) dan Berita pada masing-masing website PPID Pelaksana dan Nagari.

Dinas Kominfo selaku PPID Utama telah menetapkan Target Minimal Publikasi Dokumen Informasi Publik dan Berita pada Website Perangkat Daerah dan Nagari Tahun 2023 dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 487/116/Kpts/BPT-PS/2023 yaitu sebagai berikut :

No.	Badan Publik	Target DIP/ Tahun	Target Berita/ Tahun
1	Sekretariat Daerah/Sekretariat DPRD/ Badan/Dinas	100 Dokumen	60 Berita
2	Badan/Dinas Yang Memiliki Unit Pelaksana Teknis/Unit Kerja Layanan	200 Dokumen	60 Berita
3	Rumah Sakit Umum Daerah	200 Dokumen	60 Berita
4	Kecamatan	75 Dokumen	48 Berita
5	Pemerintahan Nagari	60 Dokumen	36 Berita

Berikut jumlah publikasi DIP dan berita untuk masing-masing Perangkat Daerah, Kecamatan dan Nagari :

a. PERANGKAT DAERAH

NO.	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH DIP	JUMLAH BERITA	TOTAL (70%*DIP + 30%*BERITA)
1	DINAS KESEHATAN*	1013	1,163	100.00
2	DINAS PERTANIAN	253	905	100.00
3	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	140	284	100.00
4	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	130	71	100.00
5	BADAN PENGELOLA KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	138	62	100.00
6	DINAS KOPERASI DAN TENAGA KERJA	78	61	84.60
7	BADAN PERENCANAAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	106	22	81.00
8	INSPEKTORAT	69	8	52.30

9	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	28	130	49.60
10	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	41	32	44.70
11	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	53	13	43.60
12	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA	41	29	43.20
13	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	15	71	40.50
14	RSUD Dr. M. ZEIN PAINAN*	65	32	38.75
15	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	47	11	38.40
16	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL *	41	47	37.85
17	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	36	24	37.20
18	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	44	6	33.80
19	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN*	30	18	19.50
20	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN	3	24	14.10
21	DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LH	20	0	14.00
22	DINAS PERDAGANGAN DAN TRANSMIGRASI	7	13	11.40
23	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	1	18	9.70
24	DINAS PERHUBUNGAN	10	1	7.50
25	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	9	1	6.80
26	RSUD TAPAN*	4	8	5.40
27	SEKRETARIAT DAERAH	3	0	2.10

	JUMLAH TOTAL	2,425	3,054	
--	---------------------	--------------	--------------	--

b. KECAMATAN

NO.	KECAMATAN	JUMLAH DIP	JUMLAH BERITA	TOTAL (70%*DIP + 30%*BERITA)
1	KECAMATAN IV JURAI	100	261	100.00
2	KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN	158	204	100.00
3	KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN	97	155	100.00
4	KECAMATAN KOTO XI TARUSAN	104	105	100.00
5	KECAMATAN AIRPURA	73	29	92.30
6	KECAMATAN BATANG KAPAS	25	41	53.33
7	KECAMATAN RANAH PESISIR	10	216	39.33
8	KECAMATAN SILAUT	28	11	35.30
9	KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI	1	114	30.93
10	KECAMATAN LENGAYANG	7	30	31.53
11	KECAMATAN SUTERA	12	0	11.20
12	KECAMATAN IV NAGARI BAYANG UTARA	8	1	8.30
13	KECAMATAN LUNANG	2	7	7.70
14	KECAMATAN PANCUNG SOAL	1	3	3.43
15	KECAMATAN BAYANG	0	0	0.00
JUMLAH TOTAL		626	1,177	

c. PEMERINTAHAN NAGARI

NO.	NAGARI	JUMLAH DIP	JUMLAH BERITA	TOTAL (70%*DIP + 30%*BERITA)
1	NAGARI AIR HAJI BARAT	189	93	100.00
2	NAGARI TAMBANG	123	128	100.00
3	NAGARI MUARA INDERAPURA	62	28	100.00
4	NAGARI SIMPANG LAMA INDERAPURA	30	25	72.00
5	NAGARI SUNGAI SIRAH AIR HAJI	53	0	70.00
6	NAGARI KOTO RAWANG	20	31	58.00
7	NAGARI TALANG KOTO PULAI TAPAN	40	0	56.00
8	NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN	18	17	46.45
9	NAGARI SETARA NANGGALO	32	0	44.80
10	NAGARI BARUNG-BARUNG BALANTAI TIMUR	32	0	44.80
11	NAGARI PADANG XI PUNGGASAN	10	18	36.50
12	NAGARI TANAH BAKALI INDERAPURA	17	9	35.05
13	NAGARI INDERAPURA UTARA	11	14	32.90
14	NAGARI PAINAN SELATAN PAINAN	0	48	30.00
15	NAGARI BALAI SINAYAN LUMPO	19	4	31.60
16	NAGARI TERATAK TEMPATIH IV KOTO MUDIEK	21	0	28.82
17	NAGARI KOTO BERAPAK	18	0	25.20
18	NAGARI SAMBUNGO	17	0	23.80
19	NAGARI KOTO VIII PELANGAI	0	19	23.75
20	NAGARI AMPUAN LUMPO	1	14	18.90
21	NAGARI KOTO NAN TIGO IV KOTO HILIE	13	0	18.20

22	NAGARI DAMAR LAPAN BATANG INDERAPURA	9	3	16.35
23	NAGARI TLUK KUALO INDERAPURA	9	0	12.60
24	NAGARI PAINAN	0	10	12.50
25	NAGARI INDERAPURA	7	0	9.80
26	NAGARI SAGO SALIDO	0	6	7.50
27	NAGARI LALANG PANJANG INDERAPURA	0	6	7.50
28	NAGARI KOTO RANAH	0	4	5.00
29	NAGARI SUNGAI TUNU UTARA	0	3	3.75
30	NAGARI KUDO-KUDO INDERAPURA	2	0	2.80
31	NAGARI LAGAN HILIR PUNGGASAN	1	0	1.40
32	NAGARI BINJAI TAPAN	0	1	1.25
33	NAGARI BUNGA PASANG SALIDO	0	1	1.25
34	NAGARI LIMAU GADANG LUMPO	0	1	1.25
JUMLAH TOTAL		754	461	

Dalam pelaksanaan Monev KIP Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan memakai teknik dan metode yang dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat yang terdapat pada Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik. Monev KIP Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan 2024, dalam penilaiannya menggunakan 4 indikator, yaitu :

- a. Pengembangan website
- b. Pengumuman informasi publik
- c. Pelayanan informasi publik
- d. Penyediaan informasi publik

Selain 4 (empat) indikator diatas, penilaian juga dilakukan dengan melihat sejauhmana unsur komitmen, kolaborasi dan inovasi dalam implementasi Undang-

Undang KIP yang dinilai melalui visitasi/kunjungan lapangan ke Badan Publik. Secara teknis tahapan dari pemeringkatan ini dilakukan dalam 3 tahapan yaitu Pengisian Kuesioner oleh Badan Publik, kedua tahap verifikasi kuesioner dan website dan ketiga tahap visitasi/kunjungan lapangan ke 5 (lima) besar Badan Publik dengan nilai tertinggi untuk masing-masing kategori Perangkat Daerah, Kecamatan dan Nagari.

Tahapan Pengisian Kuesioner diawali dengan pengiriman Kuesioner Penilaian Mandiri/Self Assesment Questionnaire (SAQ) oleh Tim Sekretariat Pemeringkatan yang selanjutnya harus diisi oleh PPID Pelaksana dan PPID Nagari yang akan menghasilkan penilaian Tahap 1 sebagai dasar untuk menetapkan 5 (lima) besar Badan Publik dengan nilai tertinggi dan masuk dalam tahap selanjutnya yaitu Presentasi/Uji Publik

Setiap tahapan dan indikator memiliki bobot tersendiri yang terdiri dari :

1. Pengembalian Kuesioner dengan bobot nilai 10%. Setiap Badan Publik yang mengisi dan mengembalikan kuesioner penilaian mandiri akan mendapatkan bobot nilai sebesar 10 poin.
2. Tahapan verifikasi kuesioner dan website dengan bobot nilai 80%.
3. Tahapan Presentasi/Uji publik, dengan bobot nilai 10% dengan indikator penilaian sebagai berikut :
 - a. Komitmen (20%)
 - b. Koordinasi (20%)
 - c. Komunikasi (20%)
 - d. Kolaborasi (20%)
 - e. Konsistensi (20%)

Presentasi/Uji Publik dilaksanakan secara panel dengan menghadirkan Tim Penilai dari Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat yang dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2024 bertempat di Hotel Triza Painan.



Presentasi Badan Publik dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tk. Kab. Pesisir Selatan Tahun 2024

Secara keseluruhan, tahapan, proses dan instrument yang digunakan tersebut akan menghasilkan nilai dan kualifikasi untuk masing-masing Badan Publik, sebagai berikut :

No.	Kualifikasi	Nilai	Notifikasi
1.	Informatif	90 – 100	Hijau
2.	Menuju Informatif	80 – 89,9	Biru
3.	Cukup Informatif	55 – 79,9	Oranye
4.	Kurang Informatif	40 – 54.9	Kuning
5.	Tidak Informatif	< 39,9	Merah

Penyerahan/Pengumuman Hasil Monev KIP Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 diberikan kepada 5 (lima) Badan Publik (Perangkat Daerah, Kecamatan dan Nagari) dengan nilai tertinggi untuk masing–masing kategori dan akan mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Setelah melalui proses dan tahapan penilaian dalam Monev KIP Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan, Tim Penilai kemudian menetapkan Berita Acara Penetapan Hasil Akhir Monitoring Dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik

Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024, Nomor :
500.12.18.1/230/KOMINFO-PS/2023, dengan hasil sebagai berikut :

I. KATEGORI : PERANGKAT DAERAH

NO.	NAMA OPD	TOTAL NILAI TAHAP 1 (90%)	PRESENT ASI (10%)	TOTAL NILAI KESELUR UHAN	KUALIFI KASI
1	DINAS PERTANIAN	88.05	9.50	97.55	Informatif
2	BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	80.78	9.39	90.17	Informatif
3	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	78.23	8.79	87.02	Menuju Informatif
4	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	79.09	7.51	86.60	Menuju Informatif
5	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	79.80	6.21	86.01	Menuju Informatif

II. KATEGORI : KECAMATAN

NO.	NAMA KECAMATAN	TOTAL NILAI TAHAP 1 (90%)	PRESENT ASI (10%)	TOTAL NILAI KESELUR UHAN	KUALIFI KASI
1	RANAH AMPEK HULU TAPAN	86.04	9.50	95.54	Informatif
2	AIRPURA	75.95	9.14	85.08	Menuju Informatif
3	BASA AMPEK BALAI TAPAN	76.91	7.38	84.29	Menuju Informatif
4	IV JURAI	70.50	8.51	79.01	Menuju Informatif
5	LINGGO SARI BAGANTI	55.68	7.95	63.63	Cukup Informatif

III. KATEGORI : PEMERINTAHAN NAGARI

NO.	NAMA KECAMATAN	TOTAL NILAI TAHAP 1 (90%)	PRESENT ASI (10%)	TOTAL NILAI KESELUR UHAN	KUALIFI KASI
1	AIR HAJI BARAT	88.63	9.47	98.10	Informatif
2	TAMBANG	87.26	9.25	96.51	Informatif
3	MUARA INDERAPURA	85.98	9.63	95.60	Informatif
4	LUNANG TIGA	80.74	5.46	86.20	Menuju Informatif
5	KOTO RAWANG	75.76	6.95	82.71	Menuju Informatif

PPID Pelaksana dan PPID Nagari terbaik mendapatkan Piagam Penghargaan dan Hadiah Uang Tunai sebesar berikut :

1. Terbaik I : Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Rupiah)
2. Terbaik II : Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)
3. Terbaik III : Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Rupiah)

Pelayanan Informasi Publik bagi Pemohon Informasi yang mengajukan permintaan informasi melalui Desk Layanan, Website dan Nomor Layanan PPID Utama Kabupaten Pesisir Selatan. Selama Tahun 2024, total permohonan informasi yang masuk baik secara langsung maupun melalui website PPID adalah sebanyak 540 permohonan. Berikut Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik PPID Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024.

4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektorl pada Bidang Statistik dan Persandian, capaian kinerjanya yaitu :
 - a. Perangkat Daerah yang mengikuti verifikasi data statistik sektoral PSDA Tahun 2024 :
 1. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendataan dan Aset Daerah;
 2. Dinas Kesehatan;
 3. Dinas Komunikasi dan Informatika;

4. Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja;
5. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga;
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
8. Dinas Perhubungan;
9. Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup;
10. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
11. Inspektorat Daerah;
12. RSUD M. Zein Painan;
13. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
14. Sekretariat DPRD;
15. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
16. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
17. Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
18. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
19. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
20. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
21. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
22. Dinas Perdagangan dan Transmigrasi;
23. Dinas Perikanan dan Pangan;
24. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
25. Dinas Pertanian;
26. Sekretariat Daerah.

Data sektoral yang telah diverifikasi, kemudian diinput dan diproses menggunakan aplikasi oleh BPS Kabupaten Pesisir Selatan. Tahap selanjutnya, data yang telah diinput dan diproses, diverifikasi ulang oleh BPS Provinsi Sumatera Barat. Setelah *Clear and Clean*, data sektoral siap untuk dicetak dan dipublikasikan baik melalui hardcopy maupun dipublish melalui website Pemerintah Daerah dan website BPS. Tahap cetak buku dan publikasi dilakukan pada semester 2 Tahun 2024.

Data sektoral yang telah diverifikasi ditampilkan dalam bentuk tabel sebanyak 232 buah. Data tersebut dicetak sebanyak 30 buah buku **Pesisir Selatan Dalam Angka 2024**. Rincian data yang telah diverifikasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

1	Sekretariat Daerah	
	1	Jumlah Produk Hukum Daerah menurut Sifat
	2	Daftar Nama Bupati Pesisir Selatan
2	Inspektorat Daerah	
	1	Jumlah Temuan, Jumlah Temuan yang Ditindaklanjuti, Jumlah ASN yang Dikenai Sanksi
3	Sekretariat DPRD	
	1	Daftar Nama Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Masa Jabatan dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2023
	2	Jumlah Anggota DPRD menurut Jenis Kelamin
4	Badan Perencanaan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan	
	1	Keadaan Geografis 2023
	2	Luas Daerah Menurut Kecamatan 2023
	3	Luas Tanah Menurut Statusnya, 2023
	4	Tinggi Wilayah Beberapa Tempat Dari Permukaan Laut, 2023
5	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
	1	Target dan Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Langsung di Kabupaten Pesisir Selatan, 2023
	2	Jumlah Kendaraan Operasional Menurut Jenis Kendaraan
	3	Target dan Realisasi PBB Menurut Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan, 2023
	4	Target dan Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah Menurut Jenis Penerimaan di Kabupaten Pesisir Selatan, 2023
	5	Target dan Realisasi Belanja Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Pesisir Selatan, 2023
	6	Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Pesisir Selatan, 2023
6	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	1	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kantor Camat Menurut Golongan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Pesisir Selatan, 2023
	2	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kantor Camat Menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Pesisir Selatan, 2023
	3	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Puskesmas Menurut Golongan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Pesisir Selatan, 2023
	4	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Puskesmas Menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Pesisir Selatan, 2023
	5	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan Menurut Golongan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Pesisir Selatan, 2023
	6	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan Menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Pesisir Selatan, 2016
	7	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

		Menurut Golongan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Pesisir Selatan, 2023
	8	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Pesisir Selatan, 2023
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	1	Jumlah Kejadian Bencana Alam Menurut Kecamatan
8	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
	1	Jumlah Sekolah, Murid, Guru dan Kelas Pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Pesisir Selatan, 2023
	2	Jumlah Sekolah, Murid, Guru Dan Kelas Pada Sekolah Dasar Negeri Dan Swasta Di Kabupaten Pesisir Selatan, 2023
	3	Jumlah Sekolah, Murid, Guru dan Kelas Pada Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Pesisir Selatan, 2023
	4	Jumlah Sekolah, Murid, Guru dan Kelas Pada Sekolah Dasar Swasta di Kabupaten Pesisir Selatan, 2023
	5	Jumlah Sekolah, Murid, Guru dan Kelas Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Swasta di Kabupaten Pesisir Selatan, 2023
	6	Jumlah Peserta dan Lulusan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Swasta Menurut Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan, 2023
	7	Jumlah Sekolah, Murid, Guru dan Kelas Pada Sekolah Menengah Pertama Swasta di Kabupaten Pesisir Selatan, 2023
	8	Jumlah Sekolah, Murid, Guru dan Kelas Pada Sekolah Menengah Umum Negeri dan Swasta di Kabupaten Pesisir Selatan, 2023
	9	Jumlah Sekolah, Murid, Guru dan Kelas Pada Sekolah Menengah Umum Negeri di Kabupaten Pesisir Selatan, 2023
	10	Jumlah Sekolah, Murid, Guru dan Kelas Pada Sekolah Menengah Umum Swasta di Kabupaten Pesisir Selatan, 2023
	11	Jumlah Sekolah, Murid, Guru dan Kelas Pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Swasta di Kabupaten Pesisir Selatan, 2023
	12	Jumlah Sekolah, Murid, Guru dan Kelas Pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Kabupaten Pesisir Selatan, 2023
	13	Jumlah Sekolah, Murid, Guru dan Kelas Pada Sekolah Menengah Kejuruan Swasta di Kabupaten Pesisir Selatan, 2023
	14	Jumlah Kelas Sekolah Dasar Negeri dan Swasta Menurut Kondisinya di Kabupaten Pesisir Selatan, 2023
	15	Jumlah Kelas Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Swasta Menurut Kondisinya di Kabupaten Pesisir Selatan, 2023
	16	Jumlah Kelas Sekolah Menengah Atas Negeri dan Swasta Menurut Kondisinya di Kabupaten Pesisir Selatan, 2023
	17	Jumlah Kelas Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Swasta Menurut Kondisinya di Kabupaten Pesisir Selatan, 2023
	18	Jumlah Peserta dan Lulusan Sekolah Dasar Negeri dan Swasta Menurut Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan, 2023
	19	Jumlah Peserta dan Lulusan Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Swasta Menurut Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan, 2023
	20	Jumlah Peserta dan Lulusan Sekolah Menengah Atas Negeri dan Swasta Menurut Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan, 2023
	21	Jumlah Peserta dan Lulusan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Swasta Menurut

		Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan, 2023
	22	Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni Budaya, Jumlah Benda Situs dan Kawasan Cagar Budaya
9	Dinas Kesehatan	
	1	Jumlah Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Posyandu Menurut Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan, 2023
	2	Jumlah dan Kapasitas Tempat Tidur pada Rumah Sakit dan Puskesmas Menurut Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan, 2023
	3	Jumlah Dokter Umum, Dokter Gigi dan Dokter Spesialis Menurut Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan, 2023
	4	Jumlah Perawat dan Bidan Menurut Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan, 2023
	5	Jumlah Kunjungan Rumah Sakit dan Puskesmas Menurut Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan, 2023
	6	Jumlah Apotek dan Toko Obat Menurut Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan, 2023
	7	Jumlah Kelahiran dan Kematian Bayi Menurut Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan, 2023
	8	Jumlah Tenaga Penolong Kelahiran Menurut Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan, 2023
	9	Jumlah Kelahiran, Abortus, Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), BBLR Dirujuk, Gizi Buruk, Kematian Ibu Sewaktu Melahirkan di Kabupaten Pesisir Selatan, 2023
	10	Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan, 2023
	11	Jumlah Kasus 10 Penyakit Terbanyak Di Kabupaten Pesisir Selatan, 2023
	12	Jumlah Ibu Hamil, Melakukan Kunjungan K1, Melakukan Kunjungan K4, Kekurangan Energi Kronis (KEK), dan Mendapat Tablet Zat Besi (Fe) di Kabupaten Pesisir Selatan, 2013-2023
	13	Jumlah Kasus HIV/AIDS, IMS, DBD, Diare, TB dan Malaria Menurut Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan, 2023
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
	1	Jumlah Klinik, Pos KB, Dan Pasangan Usia Subur (PUS) Menurut Kecamatan Di Kabupaten Pesisir Selatan
	2	Target Dan Realisasi Akseptor KB Baru Menurut Kecamatan Di Kabupaten Pesisir Selatan, 2023
	3	Jumlah Keluarga Menurut Indikator Kesejahteraan Dan Kecamatan Di Kabupaten Pesisir Selatan, 2023
	4	Jumlah Pencapaian Akseptor KB Baru Menurut Kecaatan Dan Jenis KB Di Kabupaten Pesisir Selatan, 2023
	5	Jumlah Pencapaian Akseptor KB Aktif Menurut Kecamatan Dan Jenus KB Di Kabupaten Pesisir Selatan, 2023
	6	Jumlah Remaja Usia 15-24 Tahun Yang Mendapat Penyuluhan Tentang Kesehatan Reproduksi (Kespro), HIV/AIDS dan Keluarga Berencana (KB) Menurut Kecamatan, 2023
	7	Daftar Nagari dan Kampung Menurut Kecamatan
	8	Nama Ibu Kota Kabupaten dan Ibu Kota Kecamatan
	9	Jumlah Nagari dan Kampung Menurut Kecamatan
11	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	

	1	Jumlah Izin Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	2	Jumlah Izin Bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	3	Jumlah Izin Bidang Koperasi, UMKM Perdagangan dan Industri
	4	Jumlah Izin Bidang Perhubungan
	5	Jumlah Izin Bidang Komunikasi dan Informatika
	6	Jumlah Izin Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
	7	Jumlah Izin Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
	8	Jumlah Izin Bidang Perikanan
	9	Jumlah Izin Bidang Pariwisata
	10	Jumlah Izin Bidang Kesehatan
	11	Jumlah Izin Bidang Bidang Tata Pemerintahan
	12	Jumlah Izin Bidang Pendapatan
	13	Jumlah Izin Bidang Sosial
	14	Jumlah Izin Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	15	Jumlah Izin Bidang Lingkungan Hidup
	16	Jumlah Izin Bidang Pendidikan
	17	Jumlah Izin Bidang Penanaman Modal
12	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil	
	1	Jumlah Keluarga dan Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan
	2	Jumlah Keluarga dan Jumlah Penduduk Menurut Nagari
	3	Jumlah Penduduk Usia >17 yang Ber KTP dan Jumlah Penduduk Wajib KTP Menurut Kecamatan
	4	Jumlah Penduduk Usia >17 yang Ber KTP dan Jumlah Penduduk Wajib KTP Menurut Kecamatan dan Nagari
	5	Jumlah Bayi Lahir, Jumlah Bayi Berakte Kelahiran menurut Kecamatan
	6	Jumlah Pasangan Nikah, Jumlah Pasangan Nikah Berakte Nikah Menurut Kecamatan
13	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	
	1	Jumlah Sarana Sosial menurut Kecamatan
	2	Jumlah Penyandang MKS Menurut Jenis Kelamin
	3	Jumlah Penyandang MKS Menurut Kecamatan
	4	Jumlah Penerima Bantuan Sosial menurut Kecamatan
	5	Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak
14	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan	
	1	Luas Lahan Sawah Menurut Kecamatan dan Jenis Pengairan di Kabupaten Pesisir Selatan (Ha), 2023
	2	Luas Tanam, Panen dan Produksi Padi Sawah dan Padi Ladang Menurut Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan, 2023
	3	Luas Tanam, Panen dan Produksi Padi Ladang Menurut Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan, 2023
	4	Luas Tanam, Panen dan Produksi Padi Sawah Menurut Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan, 2023
	5	Jumlah Pemakaian Pupuk Untuk Tanaman Padi Menurut Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan, 2023

	6	Jumlah Alat Pengolah Gabah Menurut Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan, 2023
	7	Luas Tanam, Panen dan Produksi Jagung Menurut Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan, 2023
	8	Luas Tanam, Panen dan Produksi Ubi Kayu Menurut Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan, 2023
	9	Luas Tanam, Panen dan Produksi Ubi Jalar Menurut Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan, 2023
	10	Luas Tanam, Panen dan Produksi Kacang Tanah Menurut Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan, 2023
	11	Luas Tanam, Panen dan Produksi Kedelai Menurut Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan, 2023
	12	Luas Tanam, Panen dan Produksi Kacang Hijau Menurut Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan, 2023
	13	Luas Tanam, Panen dan Produksi Talas Menurut Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan, 2023
	14	Luas Tanam, Panen dan Produksi Cabe Menurut Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan, 2023
	15	Luas Tanam, Panen dan Produksi Terung Menurut Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan, 2023
	16	Luas Tanam, Panen dan Produksi Mentimun Menurut Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan, 2023
	17	Luas Tanam, Panen dan Produksi Bawang Merah Menurut Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan, 2023
	18	Luas Tanam, Panen dan Produksi Bayam Menurut Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan, 2023
	19	Luas Tanam, Panen dan Produksi Kangkung Menurut Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan, 2023
	20	Luas Tanam, Panen dan Produksi Semangka Menurut Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan, 2023
	21	Luas Tanam, Panen dan Produksi Jeruk Menurut Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan, 2023
	22	Luas Tanam, Panen dan Produksi Rambutan Menurut Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan, 2023
	23	Luas Tanam, Panen dan Produksi Mangga Menurut Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan, 2023
	24	Luas Tanam, Panen dan Produksi Durian Menurut Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan, 2023
	25	Luas Tanam, Panen dan Produksi Duku Menurut Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan, 2023
	26	Luas Tanam, Panen dan Produksi Pepaya Menurut Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan, 2023
	27	Luas Tanam, Panen dan Produksi Pisang Menurut Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan, 2023
	28	Luas Tanam, Panen dan Produksi Belimbing Menurut Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan, 2023
	29	Luas Tanam, Panen dan Produksi Salak Menurut Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan, 2023

30	Luas Tanam, Panen dan Produksi Alpukat Menurut Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan, 2023
31	Luas Tanam, Panen dan Produksi Manggis Menurut Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan, 2023
32	Luas Tanam, Panen dan Produksi Tomat Menurut Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan, 2023
33	Jumlah Alat Pemberantas Hama yang Ada Pada Petani Menurut Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan, 2023
34	Luas Tanaman dan Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Rakyat Menurut Jenis di Kabupaten Pesisir Selatan, 2023
35	Luas Tanaman dan Jumlah Produksi Tanaman Karet Menurut Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan, 2023
36	Luas Tanaman dan Jumlah Produksi Tanaman Kelapa Menurut Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan, 2023
37	Luas Tanaman dan Jumlah Produksi Tanaman Kelapa Sawit Menurut Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan, 2023
38	Luas Tanaman dan Jumlah Produksi Tanaman Kulit Manis Menurut Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan, 2023
39	Luas Tanaman dan Jumlah Produksi Tanaman Cengkeh Menurut Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan, 2023
40	Luas Tanaman dan Jumlah Produksi Tanaman Kopi Menurut Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan, 2023
41	Luas Tanaman dan Jumlah Produksi Tanaman Pala Menurut Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan, 2023
42	Luas Tanaman dan Jumlah Produksi Tanaman Gambir Menurut Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan, 2023
43	Luas Tanaman dan Jumlah Produksi Tanaman Coklat Menurut Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan, 2023
44	Luas Tanaman dan Jumlah Produksi Tanaman Pinang Menurut Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan, 2023
45	Luas Tanaman dan Jumlah Produksi Tanaman Nilam Menurut Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan, 2023
46	Luas Tanaman dan Jumlah Produksi Tanaman Gardamunggu Menurut Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan, 2023
47	Jumlah Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Menurut Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan, 2023
48	Jumlah Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani Menurut Kecamatan dan Klasifikasi di Kabupaten Pesisir Selatan, 2023
49	Jumlah Ternak Menurut Jenis dan Kecamatan
50	Jumlah Pemotongan Ternak Menurut Jenis dan Kecamatan
51	Jumlah Produksi Daging Menurut Jenis dan Kecamatan
52	Jumlah Ternak Unggas Menurut Jenis dan Kecamatan
53	Jumlah Produksi Daging Unggas Menurut Jenis dan Kecamatan
54	Jumlah Produksi Telur Unggas Menurut Jenis dan Kecamatan
55	Jumlah Konsumsi Daging Menurut Jenis dan Kecamatan
56	Jumlah Konsumsi Daging Unggas Menurut Jenis dan Kecamatan

15	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga	
	1	Daftar Nama, Alamat Hotel, Jumlah Kamar, Tempat Tidur
	2	Jumlah Akomodasi Hotel Menurut Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan, 2016-2018
	3	Jumlah Restoran/Rumah Makan Menurut Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan, 2014-2018
	4	Jumlah Industri Pariwisata Menurut Kecamatan dan Jenis Usaha di Kabupaten Pesisir Selatan, 2023
	5	Arus Wisatawan yang Berkunjung di Kabupaten Pesisir Selatan, 2008-2018
	6	Jumlah Objek Wisata Menurut Jenisnya, 2023
	7	Daftar Nama, Alamat Objek Wisata Alam dan Jarak dari Ibukota Kabupaten Pesisir Selatan, 2023
	8	Daftar Nama, Alamat Objek Wisata Bahari dan Jarak dari Ibukota Kabupaten Pesisir Selatan, 2023
	9	Daftar Nama, Alamat Objek Wisata Sejarah dan Jarak dari Ibukota Kabupaten Pesisir Selatan, 2023
	10	Daftar Nama, Alamat Objek Karya Wisata dan Jarak dari Ibukota Kabupaten Pesisir Selatan, 2023
	11	Jumlah Pelatih Bersertifikat, Jumlah Atlit dan Jumlah Prestasi Cabang Olah Raga
	12	Jumlah Organisasi Pemuda, Jumlah Wirausaha Muda
16	Dinas Perikanan & Pangan	
	1	Jumlah Pulau, Nama-Nama, Lokasi Dan Luasya, 2023
	2	Jumlah Pengusaha Perikanan Laut Menurut Kecamatan
	3	Luas Areal Dan Produksi Perikanan Darat Menurut Kecamatan Di Kabpaten Pesisir Selatan, 2023
	4	Jumlah Nelayan Perikanan Laut Menurut Kecamatan Di Kabupaten Pesisir Selatan, 2023
	5	Jumlah Perahu Penangkapan Ikan Laut Menurut Kategori Dan Kecamatan Di Kabupaten Pesisir Selatan, 2023
	6	Jumlah Alat Penangkapan Ikan Laut Menurut Jenis Alat Tangkap Dan Kecamatan Di Kabupaten Pesisir Selatan, 2023
	7	Jumlah Produksi Dan Nilai Ikan Laut Segar Menurut Kecamatan, 2023
	8	Jumlah Luas Dan Produksi Ikan Sungai Menurut Kecamatan Di Kabupaten Pesisir Selatan, 2023
	9	Jumlah Luas Dan Produksi Ikan Kolam Menurut Kecamatan Di Kabupaten Pesisir Selatan, 2023
	10	Ketersediaan Energi Per Kapita Menurut Kelompok Bahan Makanan (kkal/kapita/hari) di Kabupaten Pesisir Selatan, 2013-2023
	11	Ketersediaan Protein Per Kapita Menurut Kelompok Bahan Makanan (kkal/kapita/hari) di Kabupaten Pesisir Selatan, 2013-2023
	12	Ketersediaan Lemak Per Kapita Menurut Kelompok Bahan Makanan (kkal/kapita/hari) di Kabupaten Pesisir Selatan, 2013-2023
	13	Konsumsi Pangan Penduduk di Kabupaten Pesisir Selatan, 2013-2023
	14	Jumlah Sampel Pangan yang Aman Dikonsumsi di Pedagang Pengumpul
	15	Jumlah Cadangan Pangan Masyarakat dan Cadangan Pangan Pemerintah
	16	Jumlah Kelompok Lumbung Pangan Masyarakat, LDPM, KRPL dan TTI

17	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	
	1	Panjang Jalan Kabupaten (KM) Menurut Kecamatan Dan Kondisi Jalan Di Kabupaten Pesisir Selatan, 2023
	2	Panjang Jalan Kabupaten Menurut Kecamatan Dan Permukaan Jalan (KM) Di Kabupaten Pesisir Selatan, 2023
	3	Panjang Jalan (KM) Menurut Status Kewenangan Dan Kondisi Jalan Di Kabupaten Pesisir Selatan, 2023
	4	Jarak Antara Kota Painan Dengan Beberapa Kota Di Sumatera Barat (Km), 2023
	5	Jarak Kota Painan Dengan Beberapa Ibu Kota Kecamatan dan Beberapa Daerah Lainnya (Km) Di Sumatera Barat (Km), 2023
	6	Jarak Kecamatan Ke Ibukota Kabupaten (Painan) Dan Provinsi (Padang), 2023
	7	Nama-Nama Sungai, Lokasi Dan Panjangnya, 2023
	8	Banyaknya Hari Hujan Dan Curah Hujan Menurut Kecamatan, 2023
	9	Banyaknya Hari Hujan Dan Curah Hujan Menurut Bulan, 2023
	10	Rata-Rata Suhu Kelembapan Udara Menurut Bulan Di Kabupaten Pesisir Selatan, 2023
	11	Rata-Rata Tekanan Udara, Kecepatan Angin Dan Penyinaran Matahari Menurut Bulan Di Kabupaten Pesisir Selatan, 2023
18	Dinas Perhubungan	
	1	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Menurut Bulan dan Jenis Kendaraan di Kabupaten Pesisir Selatan, 2023
	2	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Menurut Umur dan Jenis Kendaraan di Kabupaten Pesisir Selatan, 2000-2018
	3	Arus Penumpang yang Datang dan Pergi Menurut Bulan di Kabupaten Pesisir Selatan, 2023
19	Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan Dan Perindustrian	
	1	Jumlah Usaha Industri Kecil Menurut Jenis Industri
	2	Jumlah Tenaga Kerja Industri Kecil Menurut Jenis Industri
	3	Nilai Produksi Industri Kecil Menurut Jenis Industri
	4	Jumlah Koperasi dan Jumlah Anggota Menurut Jenis Koperasi di Kabupaten Pesisir Selatan, 2023
	5	Jumlah KUD Menurut Kecamatan dan Status di Kabupaten Pesisir Selatan, 2023
	6	Jumlah Simpanan, Cadangan Hutang, Volume Usaha dan Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi (Rp.000), 2023
	7	Harga Rata-Rata Komoditi Ekspor Menurut Bulan di Kabupaten Pesisir Selatan (Rp/Kg), 2023
	8	Jumlah Pedagang Menurut Kecamatan Di Kabupaten Pesisir Selatan, 2023
	9	Jumlah Sarana Perdagangan Menurut Jenisnya di Kabupaten Pesisir Selatan, 2013–2018
	10	Jumlah Perusahaan Menurut Bentuk Badan Hukum di Kabupaten Pesisir Selatan, 2011–2015
20	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup	
	1	Jumlah Dokumen Lingkungan Hidup yang Diterbitkan Menurut Kecamatan
	2	Jumlah Tempat Pembuangan Akhir Sampah dan Jumlah Sampah
	3	Jumlah Bank Sampah, Pusat Daur Ulang, Pengomposan Menurut Kecamatan
	4	Hasil Pengukuran Indek Kualitas Air, Hasil Pengukuran Indek Kualitas Udara, Hasil

		Pengukuran Indek Kualitas Lahan
	5	Luas Area Permukiman, Luas Area Permukiman Tertata, Luas Permukiman Kumuh, Luas Lahan Bersertifikasi
	6	Jumlah Rumah, Rumah Layak Huni, dan Tidak Layak Huni
21	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	
	1	Jumlah Pustaka Menurut Jenis Pustaka
	2	Jumlah Judul Buku Perpustakaan Umum Daerah
	3	Jumlah Pengunjung Pustaka Umum Daerah
	4	Jumlah Perpustakaan Sekolah Dasar dan Titik Layanan Perunit
	5	Jumlah Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama dan Titik Layanan Perunit
	6	Jumlah Perpustakaan Sekolah Menengah Umum serta Jumlah Pengunjung
	7	Jumlah Perpustakaan Pemerintahan Nagari serta Jumlah Pengunjung
	8	Jumlah Taman Baca Masyarakat serta Jumlah Pengunjung
	9	Jumlah Perpustakaan Mesjid dan Titik Layanan Perunit serta Jumlah Pengunjung
	10	Jumlah Titik Layanan Perpustakaan Keliling
22	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
	1	Jumlah Pencari Kerja Terdaftar Tingkat Pendidikan Tertinggi
	2	Jumlah Penduduk Usia 15 Keatas Menurut Jenis Kegiatan Utama
	3	Jumlah Tenaga Kerja menurut Tempat Bekerja
	4	Jumlah Tenaga Kerja Menurut Kepesertaan BPJS
23	Direktur Rumah Sakit Daerah (RSUD) M. Zain Painan	
	1	Jumlah Tenaga Medis, Paramedis dan Tenaga Lainnya
24	Dinas Komunikasi Dan Informatika	
	1	Jumlah Aplikasi Elektronik
	2	Jumlah Menara Telekomunikasi Menurut Perusahaan Menara dan Kecamatan
	3	Jumlah Nagari Tanpa Sinyal, Jumlah Layanan Wifi Gratis dan Jumlah KIM
	4	Jumlah Layanan Wifi Gratis
	5	Jumlah Penduduk Menggunakan HP, Jumlah RT yang Memiliki Akses Internet, Jumlah RT memiliki Komputer Pribadi, Jumlah KIM
25	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
	1	Jumlah Pelanggaran K3 dan Pelanggaran Perda
	2	Jumlah Pelanggaran K3 yang terselesaikan, Kasus Kebakaran, dan Jumlah Penyelesaian Pelanggaran Perda

Disamping buku Pesisir Selatan Dalam Angka, Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektorial telah berhasil beberapa buku statistik lainnya. Buku lainnya adalah **PDRB Pengeluaran 2019-2023 sebanyak 15 buah, buku PDRB Lapangan Usaha 2019-2023 15 buah, Kecamatan Dalam Angka 2024 15 buku, dan buku Ringkasan Metadata Statistik sebanyak 15 buah buku.**

- b. Dari beberapa rangkaian pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan statistik sektoral dalam upaya peningkatan kapasitas SDM Pemda dan kapasitas

kelembagaan statistik sektoral dalam peningkatan mutu statistik daerah, yang berupa workshop, sosialisasi dan bimbingan teknis yang telah diikuti secara keseluruhan oleh ASN yang terkait pengelola data statistik sektoral sebanyak 150 (seratus lima puluh) orang.

Selain itu Bidang Statistik dan Persandian bersama pejabat teknis dari Badan Pusat Statistik setelah melaksanakan rapat Monitoring dan Evaluasi terhadap kegiatan penyusunan Metadata Kegiatan (MS-Keg), Metadata Indikator (MS-Ind) dan Metadata Variabel (MS-Var) serta pengajuan rekomendasi statistik melalui aplikasi yang tersedia dan penginputan survey pemanfaatan data statistik sektoral dari masing-masing perangkat daerah untuk perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah dengan rincian sebagai berikut :

- a. Daftar perangkat yang telah menyusun data dan informasi metadata sebagai berikut :

Rekap Metadata Kegiatan Statistik Tahun 2024			
No	Nama OPD	Nama Metadata	
1	Sekretariat DPRD	1	Kompilasi Produk Administrasi Profil DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
2	Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengemangan	2	Kompilasi Capaian Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3	kompilasi produk administrasi data kejadian bencana
4	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4	Kompilasi Produk Administrasi Ormas Di Kabupaten Pesisir Selatan
5	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	5	Kompilasi Produk Administrasi Data Keuangan Daerah Melalui SIPKD
6	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	6	Kompilasi Produk Adminitrasi Data Kepegawaian Melalui E-Simpeg
7	Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja	7	Kompilasi Data Koperasi
		8	Kompilasi Produk Administrasi Data Statistik Pertanian
8	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	9	Kompilasi Produk Adminitrasi Data Penyandang Disabilitas Tahun 2023 Kabupaten Pesisir selatan
9	Dinas Pertanian	10	Kompilasi Produk Adminitrasi Data Statistik Pertanian
10	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi	11	Kompilasi Produk Adminitrasi Data Industri Kecil Menengah
11	Dinas Pekerjaan Umum dan Penatan Ruang	12	pendataan jalan kabupaten
12	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	13	Kompilasi Produk Adminitrasi Penanganan Rumah Tidak Layak Huni
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	14	Kompilasi Produk Adminitrasi Capaian Aksepor KB
14	Dinas Perikanan dan Pangan	15	Kompilasi Produk Administrasi Data Dan Informasi Pembudidayaan Ikan Kabupaten Pesisir Selatan
		16	Kompilasi Produk Administrasi Data dan Informasi Perikanan Tangkap
15	Dinas Kesehatan	17	Kompilasi Produk Administrasi Profil Dinas Kesehatan
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	18	Kompilasi Produk Adminitrasi Data Perpustakaan
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	19	Kompilasi Produk Adminitrasi Data Investasi Pada Dinas DP MP TSP Kab. Pesisir Selatan
18	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	20	Kompilasi Produk Adminitrasi Profil Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan
19	Dinas Komunikasi dan Informatika	21	Kompilasi Produk Adminitrasi Akses intremet
20	RSUD M. Zein Painan	22	Kompilasi Produk Adminitrasi Kunjungan RSUD Dr. Muhammad Zein Painan
21	Dinas Kependudukan dan catatan Sipil	23	Kompilasi Produk Administrasi Data Kependudukan Tahun
22	Dinas Perhubungan	24	Pendataan Angkutan Umum di Wilayah Pesisir Selatan

b. Sedangkan perangkat daerah yang masih belum menyusun data metadatanya adalah :

- a) Bagian Hukum Sekretariat Daerah
- b) Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga
- c) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Terkait Inspektorat tidak menerbitkan data yang dapat dipublikasikan sehingga instansi terkait tidak menyusun meta data.

c. Perangkat daerah yang telah mengirimkan kembali dokumen survey pemanfaatan data statistik sektoral sebanyak 14 (empat belas) perangkat daerah yaitu :

- a) Dinas Pertanian
- b) RSUD M. Zein Painan
- c) Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- d) Dinas Koperasi Usaha kecil, Menengah dan Tenaga Kerja
- e) Dinas Perdagangan dan Transmigrasi
- f) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- g) Dinas Perikanan dan Pangan
- h) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- i) Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
- j) Dinas Komunikasi dan Informatika
- k) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
- l) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- m) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
- n) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

d. Perangkat daerah yang telah disetujui pengajuan rekomendasi statistik melalui aplikasi <https://romantikbps.go.id> sebanyak 7 (tujuh) perangkat daerah adalah :

- a) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
- b) RSUD M. Zein Painan
- c) Dinas Koperasi Usaha kecil, Menengah dan Tenaga Kerja
- d) Dinas Perdagangan dan Transmigrasi
- e) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- f) Dinas Perikanan dan Pangan
- g) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Berdasarkan surat Kepala Badan Pusat Statistik Nomor : B-466/01000/ES/2024 Tanggal, 17 September 2024 tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS). Berdasarkan hasil EPSS, nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS) **Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan** tahun 2024 adalah **2,38** dengan predikat “**Cukup**”.

Tujuan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) adalah untuk mengukur capaian kemajuan penyelenggaraan statistik sektoral, meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang statistik pada instansi pusat dan pemerintahan daerah. Selain itu, evaluasi ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dan rekomendasi dalam penyelenggaraan statistik sektoral di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

Gambar hasil penilaian :

Nilai Indeks Pembangunan Statistik dan Nilai Indeks Domain

Domain	Bobot	Nilai Harapan	Nilai Nasional	Nilai Hasil Penilaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Domain Prinsip SDI	28%	2,60	2,43	2,50
Domain Kualitas Data	24%	2,60	2,27	2,20
Domain Proses Bisnis Statistik	19%	2,60	2,47	3,00
Domain Kelembagaan	17%	2,60	2,32	2,18
Domain Statistik Nasional	12%	2,60	2,20	1,79
Indeks Pembangunan Statistik	100%	2,60	2,35	2,38

- Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi pada Bidang Statistik dan Persandian, capaian kinerjanya yaitu :

Rekapitulasi Tanda Tangan Elektronik (TTE) Sesuai Laporan Layanan Pemanfaatan Sertifikat Elektronik Pemerintah Kab. Pesisir Selatan Periode November 2024 adalah sebagai berikut :

Bulan	Jumlah Sertifikat berdasarkan Status				Jumlah
	Terbit Baru	Dicabut	Diperpanjang	Dihentikan (expired)	
Januari	185	0	0	0	185
Februari	24	1	0	0	25
Maret	22	0	0	0	22
April	35	0	1	0	36
Mei	32	0	0	0	32
Juni	10	0	0	0	10
Juli	0	0	0	0	0
Agustus	8	0	0	0	8
September	43	0	0	0	43
Oktober	3	0	0	0	3
November	3	0	0	0	3
Jumlah	365	1	1	0	367

Sumber: Balai Besar Sertifikasi Elektronik (November, 2024)

Pembuatan Tanda Tangan Digital pada Tahun 2024 ini ditargetkan sebanyak 100 yang telah terdaftar memiliki sertifikat elektronik sedangkan yang telah terbit baru sampai saat di Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan berjumlah 362 sertifikat elektronik, dicabut sebanyak 1 sertifikat elektronik dikarenakan pindah instansi dan 1 sertifikat elektronik dikarenakan telah expired.

2. Kebijakan Strategis

Kebijakan Strategis pembangunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan difokuskan kepada Peningkatan Komunikasi dan Informatika. Kebijakan pembangunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan merupakan turunan dari kebijakan pembangunan nasional dan pembangunan Provinsi Sumatera Barat dengan mempertimbangkan potensi dan keunggulan daerah yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan. Adapun arah kebijakan umum pembangunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan periode tahun 2021 - 2026 adalah :

- a. Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja
- b. Meningkatnya Kapabilitas Birokrasi
- c. Meningkatnya Digitalisasi Pemerintahan

- d. Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik
- e. Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah

Pembangunan dan pemanfaatan komunikasi dan informatika dalam rangka melaksanakan Program Unggulan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan untuk mencapai visi **“Mewujudkan Pesisir Selatan Lebih Sejahtera, Maju, Dan Bermartabat Didukung Pemerintahan Yang Akuntabel Dan Profesional”**.

Kebijakan strategis yang dilakukan sesuai dengan implementasi Misi pertama yang bertujuan untuk . Memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan antara lain dengan Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2024 difokuskan untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Implementasi SPBE, yakni pengembangan infrastruktur TIK, penyusunan dokumen tata kelola SPBE (ASPBE To-be), interoperabilitas dan integrasi aplikasi, informasi melalui media (media online/siber, website, sosial media, elektronik, radio, baliho, spanduk dan videotron), pengaduan masyarakat dan komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat (Literasi Digital pada Masyarakat Millennial dan aplikasi LAPOR!).
2. Pemanfaatan data statistik sektoral (Satu Data Kabupaten Pesisir Selatan).

2.2 Kebijakan Strategis yang Ditetapkan

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
	-	-	-

2.3 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Kabupaten Pesisir atas LKPJ Bupati Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024

Tabel 2.3

**Tindak lanjut Rekomendasi DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Akhir Tahun Anggaran 2024**

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2024	Tindaklanjut	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
		NIHIL	

BAB III

CAPAIAN KINERJA TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

Pemberian Tugas Pembantuan kepada daerah dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan umum. Sedangkan tujuan yang diharapkan adalah untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan serta membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pengembangan pembangunan daerah. Tugas Pembantuan itu sendiri merupakan salah satu azas penyelenggaraan pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat didesentralisasikan dan diotonomkan kepada daerah.

Berdasar amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, maka dalam penyelenggaraan pemerintahan didasarkan pada asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Latar belakang penyelenggaraan asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan, karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi, dan tidak mungkin semua wewenang pemerintah didesentralisasikan dan diotonomkan kepada daerah.

Penyelenggaraan atas tugas pembantuan merupakan cerminan dari sistem dan prosedur penugasan Pemerintah kepada daerah dan atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi penugasan. Pemberian tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum. Selanjutnya tujuan pemberian tugas pembantuan adalah untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan, serta membantu penyelenggaraan pemerintahan, dan pengembangan pembangunan bagi daerah dan desa.

3.1 Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan yang Diterima Dari Pemerintahan Tingkat di atasnya

Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota biasanya bersumber dana dari APBN Kementerian. Pada tahun 2024 di Dinas Komunikasi dan Informatika tidak ada Tugas Pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi.

3.2 Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan yang Diberikan Kepada Tingkatan Pemerintahan Tingkat di bawahnya

Pada tahun 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika tidak ada Tugas Pembantuan yang diberikan Kepada Nagari/Desa.

BAB V

PENUTUP

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan adalah laporan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah selama 1 (satu) tahun anggaran yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007.

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKpj) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024 merupakan laporan pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2024 dengan mengacu pada kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, pelaksanaan asas desentralisasi, pengelolaan keuangan serta tugas umum pemerintahan.

Dari hasil kinerja yang dilaporkan pada Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024, dapat disimpulkan bahwa dalam pembangunan yang telah dilaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan, pada umum dinilai berjalan dengan baik dan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan.

Painan, 15 Januari 2025

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Pesisir Selatan



WENDI, SH., M. Hum
NIP. 19760407.199803 1 005